

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018

(Studi Kasus Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan)

SKRIPSI

OLEH :

KUSMAYADI
NIM : 128510020



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 20/8/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri terdapat bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 18 Maret 2019



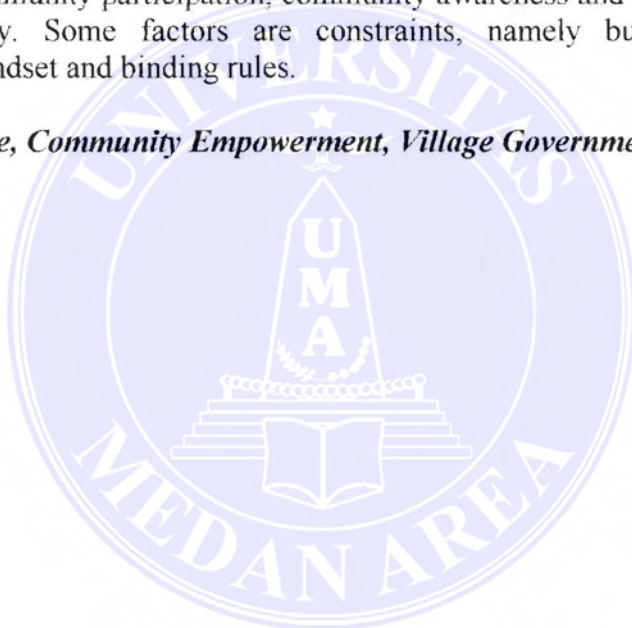
128510020

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the District Government in Community Empowerment in Helvetia Tengah Village Medan Helvetia District, Medan City and the factors that influence it. To achieve these objectives, a qualitative research method was used by deciphering data descriptively. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed: the role of the Government as human development was carried out by conducting socialization, counseling as well as participatory community involvement, business development by providing direction and support with mutual cooperation and instilling religious values in the community and developing institutions by carrying out harmonious relations, giving direction as well as support for community institutions in Central Helvetia, Medan Medan helvetia covering supporting factors and barriers. Supporting factors are community participation, community awareness and education level of the community. Some factors are constraints, namely budget constraints, community mindset and binding rules.

Keywords: Role, Community Empowerment, Village Government

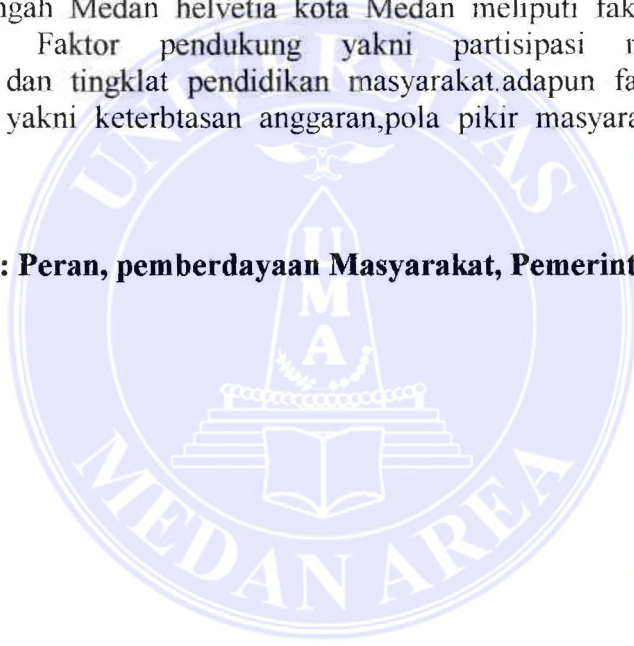


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : peran Pemerintah sebagai bina manusia dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan serta pelibatan masyarakat secara partisipatif, bina usaha dengan memberikan arahan serta dukungan dengan semangat gotong royong dan menanamkan nilai keagamaan keagamaan dilingkungan masyarakat dan bina kelembagaan dengan menjalani hubungan yang harmonis, memberikan arahan serta dukungan pada lembaga masyarakat di Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat yakni keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

Kata Kunci : Peran, pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan)”**.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan Pada Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, dalam memperoleh gelar sarjana Kepemerintahan. Semoga kasih dan anugrah dari Allah SWT selalu mengalir dan menyertai penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempumaan, hal ini terjadi karna keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan karya ilmiah. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, gagasan, moral, maupun materi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof DR. H. M. Arif Nasution. MA, selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan. Area, dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan selalu menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Yurial Arief Lubis. S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area dan sekaligus selaku dosen Sekretaris Pembimbing.
3. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen-Dosen dan Staf pegawai Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membimbing penulis dari awal hingga detik ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

5. Terkhusus dan istimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang luar biasa, mendidik, memotivasi dan memberikan banyak nasehat sampai detik ini. Tak lupa juga kepada keluarga yang selalu menclukung penulis dengan caranya sendiri selama ini, dan dukungan moril dan moral serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman- teman studi pemerintahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah membagi banyak cerita selama masa perkuliahan kita. Semoga kita tetap menjacli satu keluarga dan tali silaturahmi kita tidak terputus. Selamat beduang untuk masa depan kawan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca agar memberi kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Terimakasih

Medan, 2018
Penulis,

Kusmayadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2.Fokus Penelitian	5
1.3.Rumusan Masalah	5
1.4.Tujuan Penelitian	5
1.5.Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Peran	7
2.2.Pemerintah Kelurahan.....	8
2.3.Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	14
2.4.Prinsip-Prinsip Pemberdayaan masyarakat	19
2.5.Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	21
2.6.Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat	22
2.7.Kerangka Pemikiran	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.3.Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	26
1. Sumber Data	26
2. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4.Instrumen Penelitian	27
3.5.Teknik Analisis Data.....	28
3.6.Pengujian Kredibilitas Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Sejarah Kelurahan Helvetia Tengah.....	31
2. Geografi.....	32
3. Demografi.....	32
4. Sarana dan Prasarana Kelurahan.....	34
5. Potensi Kelurahan.....	29
6. Struktur Organisasi Kelurahan Helvetia Tengah.....	37
7. Data Pegawai Kelurahan Helvetia Tengah.....	38
8. Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan.....	39
9. Program Kegiatan Kelurahan.....	40
4.1.2. Penyajian Data Hasil Penelitian.....	44
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	45
2. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Helvetia Tengah.....	45
3. Faktor Penghambat Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Helvetia Tengah.....	50
4.1.3. Pembahasan.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 73 tahun 2005 tentang pemerintah kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi masyarakat mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak berbicara dan mengemukakan pendapat sesuai dengan kepentingan sendiri. Di sini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan serta kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Kebijakan otonomi daerah juga mengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang lugs kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintahan daerah kepada masyarakat lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah. di pandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan, namun sayangnya sampai dengan saat ini belum dibuatkan petunjuk pelaksanaan setingkat peraturan

pemerintah, sehingga dalam implementasinya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan dijadikan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang, yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat mandiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan bahwa lurch mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembanunan yang partisipatif, pada lingkungan pemerintah yang jujur, adil, demokratis, dan bertanggungjawab pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi social, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Salah satu peranan penting Pemerintah Desa atau Kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka. tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan Desa atau Kelurahan yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang. Musrenbang Desa atau Kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekedar tuntutan tugas semata.

Program-program pembangunan di kelurahan biasanya dituang didalam Musrenbang kelurahan, musrenbang ditingkat kelurahan penting dilakukan didalam menyusun rencana pembangunan kelurahan baik pembangunan yang sedang berjalan maupun pembangunan yang akan dilakukan oleh kelurahan dimasa yang akan datang.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004:154).

Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemlihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingan sendiri.

Di sini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan

Serta kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan. Masyarakat lapisan bawah perlu di berdayakan karena masih mencerminkan adanya kelemahan, kekurangan dan kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial dan keterampilan.

Pada dasarnya program pemerintah seperti program pembangunan sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat, karena keberhasilan program pembangunan ini tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka, semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitupun sebaliknya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

Namun hal ini tidak terlihat di Kelurahan Helvetia Tengah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak terlihat, seperti pada kegiatan musrembang Kelurahan. Masyarakat yang hadir hanya tokoh masyarakat dan pejabat kelurahan. Dapat dikatakan dalam proses musrenbang partisipasi masyarakat masih terlihat kurang baik. masyarakat masih saja mengalami kesenjangan dalam kaitannya dengan keberadaan mereka ketika akan memasuki area-area publik. Bila dilihat dari sisi peran, akses, manfaat, maupun control.

Dengan demikian mengindikasikan bahwa peran lurah dalam melakukan pemberdayaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, pasal 229 ayat 4 huruf (c) yang ada di kelurahan Helvetia Tengah masih kurang memadai. karena tidak di dukung oleh program-program kerja ditingkat pemerintah kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

1.2. Fokus Penelitian

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga dapat mengaburkan tujuan utama dari pada sebuah penelitian, maka peneliti memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: **Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat Tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan).**

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat Pada Tahun 2018 di Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam Pemberdayaan masyarakat Tahun 2018 di Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

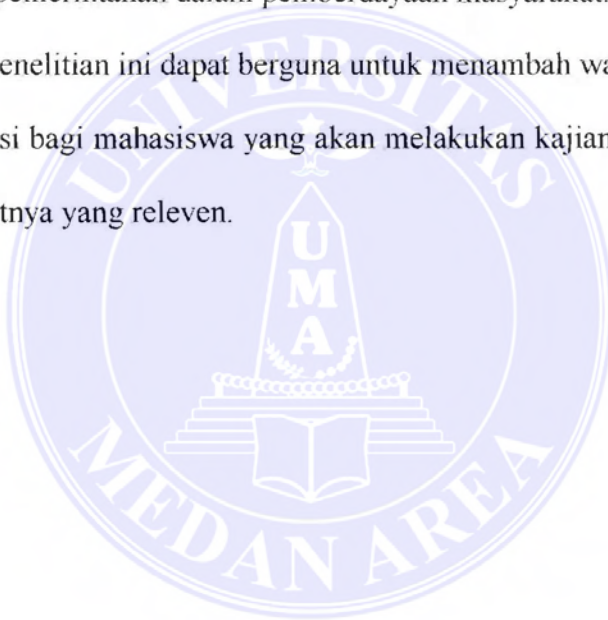
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
2. Untuk faktor penghambat dalam Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian

1. Manfaat Akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap upaya pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Peran

Membahas tentang peran, maka kita akan membicarakan kemampuan seseorang atau lembaga dalam memberikan fungsinya secara maksimal kepada suatu objek yang menjadi sasaran, berkaitan dengan hal itu kita dapat memberikan banyak pengertian peran, baik dari para ahli maupun dalam literatur yang dikutip.

Menurut Biddle dalam Suhardono (1994), berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur social” Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian Menurut Soekanto (2002:76) peran dibagi menjadi tiga yaitu: peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif. dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsifungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Menurut Soekanto (2009: 212). “peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, pembedaan antar kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya”.

Menurut Soekanto (2009: 213), aspek-aspek peran sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan sebagai perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan atau kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

2.2 Pemerintah Kelurahan

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah

telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (Sarundajang, 2002:5)

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan HR. 2002:2). Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Bagir Marian. 2001:101).

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintah diartikan sebagai sesuatu dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Soemantri, 1976: 17). Secara setimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunkan suatu rancangan maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik.

Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai usaha mencapai tujuan sempit negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah segala

kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Samuel E Finer dalam Syafi'ie (2004: 5), mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*procces*), harus mempunyai negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*), dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*menner, method, and system*) terhadap rakyat.

Menurut Suhady dalam Tjandra (2009: 197) pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction administration of the meafvomen in a nation state, cyty, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiaiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai *the governing body of nation. state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya. Konsep pemerintah didefinsiikan oleh Istianto (2009:25) adalah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara.

Tujuan dalam pemrintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, is harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diigiini secara samar-samar oleh semua orang, yang diluksiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Menurut Rasyid dalam Istianto (2009: 26), membagi fungsi pemerintah

menjadi empat bagian yaitu :

1. Fungsi pelayanan
2. Fungsi Pembangunan
3. Fungsi Pemberdayaan
4. Fungsi Pengaturan

Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Secara terperinci tugas pokok dari aparat pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut

a. Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan. kepegawaian. perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina. Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

f. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi Pemerintahan dan tugas pembangunan di Kelurahan. Maka dari itu tugas seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakatnya sehingga dengan demikian diharapkan agar pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan; Penyusunan dan sinkronisasi usulan program

dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;

- g. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peran pemerintah kelurahan Sawang Bendar dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut

- a. Pembina masyarakat,
- b. Pengayom masyarakat,
- c. Pelayan masyarakat

2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41).

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa atau Kelurahan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003).

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "*empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable* dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik seperti jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan

paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di Kelurahan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program - program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga penataan-penataannya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan Serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penayadaran pada tahap penayadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penayadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun – “demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah

Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Himawan S. Pambudi, dkk (2003): 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat. agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut:

- a. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
- b. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
- c. Masalah kesadaran, masyarakat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkait dengan nasib. Sebagian dari golongan elit mensosialisasikan masalah ini secara sistematis, apakah melalui lembaga pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan).
- d. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit.
- e. Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

Sardlow dalam Adi. (2003:54) melihat berbagai pengetahuan yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu:

Pertama, kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar idividu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud. sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan

social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (dipedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

2.4 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik.

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan

sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans (1961) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilanya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya mengikuti kegiatan belajar / pemberdayaan di masa-masa mendatang;
3. Asosiasi, artinya kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melibatkan cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik: melihat tanaman kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha penupukan. dll.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kedesama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

2.5 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2012:113-117) Lingkup kegiatan Pemberdayaan terdiri dari: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

a. Bina Manusia

Lingkup pemberdayaan dalam bina manusia difokuskan kepada 2 hal yaitu:

1. Upaya Peningkatan Kemampuan Masyarakat
2. Upaya peningkatan posisi tawar masyarakat

b. Bina Usaha

Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti:

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.

4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.

c. Bina Lingkungan

Pembansaunan telah membawa dampak negatif sebagai pencemaran lingkungan akibat dari adanya limbah industri dan rumah tangga. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

d. Bina Kelembagaan

Bina Kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

2.6 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki indikator-indikator untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan tercapai sesuai dengan harapan. Suharto dalam Hatu. (2010:103) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu:

a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi, Penciclikan dan Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan ekonomi berkenaan dengan mutu pekerjaan masyarakat sedangkan di bidang pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Peningkatan Pendapatan masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya petani dapat meningkatkan hasil panennya sehingga menambah penghasilannya setiap bulan.

c. Partisipasi dalam pembangunan.

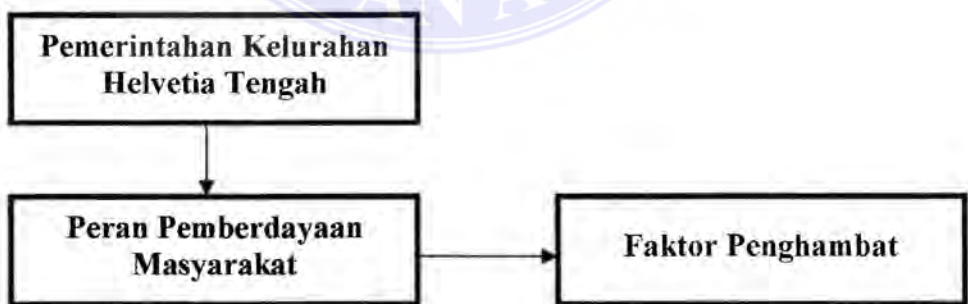
Pemberdayaan masyarakat tampak pula pada partisipasi dalam pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur dalam bentuk partisipasi ide pikiran, partisipasi bantuan dana maupun bantuan tenaga dalam pembangunan yang ada di desa.

Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan, yakni:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender

2.7 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Salah satu peranan penting pemerintah kelurahan adalah menjalankan fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat, seperti tertuang di dalam pasal 229

ayat 3 Undang-Undang tahun 2014. Tugas pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat sebagai proses partisipatif yang memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan, hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan mempertajam keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan.

Dimana menurut Mardikanto (2012:113-117) Lingkup kegiatan Pemberdayaan terdiri dari Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Didalam lingkup pemberdayaan tersebut apakah ada faktor-faktor yang menghambat dalam upaya pemberdayaan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong, (2007: 6) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, Menurut Bungin (2013: 33) pengertian tentang jenis penelitian berupa deskriptif kualitatif adalah :

Suatu penelitian sosial yang sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel, penelitian kualitatif berusaha menampilkan secara holistic (utuh) yang membutuhkan kecermatan dalam pengamatan, sehingga kita dapat memahami secara menyeluruh hasil penelitian.

Di samping itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang peneliti butuhkan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan mengklarifikasikan fakta atau karakteristik fenomena yang ada secara faktual, cermat, tidak mengandalkan bukti logika matematis. prinsip angka atau metode statistik sehingga dapat digambarkan kondisi dan keadaan yang sebenar – benarnya dengan isyarat atau tindakan sosial.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang beralamat di Jl. Matahari Raya (Sebelah Polsek Helvetia) Medan Sumatera Utara Indonesia. Adapun waktu penelitian dimulai dari Maret-Mei 2018.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data disini berarti pencarian sumber-sumber, penentuan akses ke sumber-sumber dan akhirnya mempelajari dan mengumpulkan informasi (Birowo, 2004: 26). Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data merupakan bagian instrument pengumpulan data yang sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu penelitian.

Menurut Birowo (2004:27), Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Irepository.uma.ac.id | 20/8/24

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber literatur yang di peroleh dari buku, jurnal, internet, dan koran, yang menjadi media referensi atas kepentingan keragaman informasi penelitian.

2. Wawancara Mendalam, (*Indepth Interview*)

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil sertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

3. Observasi atau pengamatan

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati secara visual sehingga validasi data sangat bergantung kepada kemampuan observer. Sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Dalam hal ini instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah

instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu

sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Menurut Moleong (2013): 168). Instrumen dalam penelitian adalah sebagai berikut

1. Instrumen pokok dalam-penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responder dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Adapun Informan dalam penelitian adalah:
 - a. Kepala Kelurahan (Lurah)
 - b. Sekretaris Lurah
 - c. Kepala Lingkungan

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong, (2013: 103) merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. mensintesisnya. mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman dalam Moleong, (2013: 248) yaitu *interactive*

model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*Data. Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan hasil wawancara yang didapat dipilah kembali dan difokuskan sesuai pada masalah penelitian.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini hasil wawancara yang ditemui pada saat peneliti disajikan dan dinarasikan untuk memperielas pembaca.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Dalam penelitian ini setelah data di sajikan dalam bentuk narasi ditarik kesimpulan untuk melihat simpulan dari penelitian.

3.6. Pengujian Kredibilitas Data

Setiap penelitian hares memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Menurut (Moleong, 2013: 86), upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan mengamati kembali lapangan untuk membuktikan hasil wawancara.

b. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut. Peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

c. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti melakukan pengecekan kembali baik dari hasil wawancara dan observasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa luruh mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Helvetia Tengah hanya mencakup peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan gotong royong serta pembinaan keagamaan. Peran Pemerintah Kelurahan Helvetia Tengah dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa menjalin hubungan dengan lembaga masyarakat yang ada serta memberikan motivasi bagi mereka agar setiap program yang dijalankan itu dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran dan pola pikir masyarakat. Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. dan Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap sebuah program serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kendala terhadap

keberhasilan tujuan pemberdayaan masyarakat.

5.2. Saran

1. Peningkatan dan penguatan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan. agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa berjalan sesuai prakarsa masyarakat karena pada hakikatnya sasaran pembangunan dan pemberdayaan adalah kesejahteraan masyarakat agar tercapai hidup sejahtera semua warga masyarakat kelurahan Helvetia Tengah.
2. Untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis baik pada lembaga masyarakat maupun pada masyarakat dengan mengacu pada konsep keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat. tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten lebih memperhatikan nasib kelurahan yang serba kekurangan anggaran, tidak hanya desa yang menjadi perhatian mereka tapi juga kelurahan karena pada dasarnya semua prang ingin berubah dan perubahan disuatu daerah terletak dari seberapa besar peranan pemerintah didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakvatan*. Humaniora. Bandung
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: kencana prena media group
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press (HUP). Bandung
- Ina Kencana Syafie. 1994. *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Media widya Mandala, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Prasadja, Buddy. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*.

- Slagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2006. *Nfeinhungun. I las. varukai melnberdqvakan Rak~, al*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Surjono. Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigms, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bavumedia Publishing.
- Syarifin. Jubaedah Dedah. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV.Pustaka Setia. Bandung
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Usman Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Widjaja. HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wrihatnolo. Randy R.& Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

DOKUMEN DAN SUMBER LAINNYA

Undang-Undang Republik **Indonesia Nomor 32 Tahun 2004** Tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang **Nomor 12 Tahun 2008** tentang perubahan kedua atas Undang-
undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah

~~Undang-Undang~~ **Nomor 23 Tahun 2014** tentang perubahan ketiga atas Undang-
undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan.

